

Analisis Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Tonti Daeng Manggangka Di Desa Palangka, Kabupaten Sinjai

Asriani^{1*}, dan Muhammad Dedy Miswar²

¹ Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar

² Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the management level of planning, organizing, implementing, and supervising the management of Tonti Daeng Maggangka Village Owned Enterprises (BUMDes) in Palangka Village. This research was carried out at the BUMDes office in Palangka Village, South Sinjai District, Sinjai Regency using a sample of 62 people, the reason for choosing BUMDes in Palangka Village is because this village is one of the areas that has BUMDes and there has been economic development of rural communities in Palangka Village, South Sinjai District, Sinjai Regency. the existence of BUMDes. From the results of calculations using the method of multiple linear regression analysis through the SPSS program to determine or see the effect of variables Simultaneously or partially, that Planning, Organizing, Implementation, and Controlling has a simultaneous effect on BUMDes management. Of the four managements, the most dominant influence is Planning.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui manajemen tingkat perencanaan pengorganisasian pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tonti Daeng Maggangka di Desa Palangka. Penelitian ini dilaksanakan dikantor BUMDes Desa Palangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai dengan menggunakan sampel sebanyak 62 orang, alasan pemilihan BUMDes Desa Palangka karena desa ini merupakan salah satu daerah yang memiliki BUMDes serta telah terjadi pengembangan ekonomi masyarakat desa di desa Palangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai dengan adanya BUMDes. Dari hasil perhitungan menggunakan metode analisis regresi liner berganda untuk menentukan atau melihat pengaruh variabel Secara Simultan atau parsial, bahwa *Planning, Organizing, Implementation, dan Controlling* mempunyai pengaruh yang simultan terhadap manajemen BUMDes. Dari keempat manajemen tersebut, yang paling dominan pengaruhnya adalah *Planning*.

Keywords:

BUMDes; Management; Village Enterprise.

* Corresponding Author at Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar, Jl. Meranti No. 1 Panakkukang, Makassar 90231 South Sulawesi, Indonesia.
E-mail address: asriani@stieamkop.ac.id (author#1)

1. Pendahuluan

Dengan terbitnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, terjadi pergeseran peran desa yang semula berperan sebagai local state government, maka saat ini desa sebagai pemerintahan masyarakat, hybrid antara self governing community dan local self government. Desa memerlukan sistem pengelolaan baru, sehingga desa mampu mewujudkan perannya sesuai dengan amanat ekonomi desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDES sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDES adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa.

Sehingga desa merupakan miniature dan sample yang sangat baik untuk mengamati secara seksama interaksi antara pemerintah dengan masyarakatnya. Dan melalui desa inilah badan usaha milik desa dapat diselenggarakan dengan mengacu pada peraturan desa yang didasarkan pada peraturan daerah. BUMDes ini diharapkan juga mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Aset ekonomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Substansi dan filosofi BUMDes harus dijiwai dengan semangat kebersamaan dan self help sebagai upaya memperkuat aspek ekonomi kelembagaannya. Pada tahap ini, BUMDes akan bergerak seiring dengan upaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli desa, menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat di mana peran BUMDes sebagai institusi payung dalam menaungi. Upaya ini juga penting dalam kerangka mengurangi peran free-rider yang seringkali meningkatkan biaya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat melalui praktek rente (Nurcholis, 2011).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan dan potensi desa. Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa, pasal 1 ayat 7 yaitu "Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa, pelayanan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa".

Kabupaten Sinjai terdapat Sembilan Kecamatan di antaranya Kecamatan Bulu Poddo, Kecamatan Pulau Sembilan, Kecamatan Sinjai Barat, Kecamatan Sinjai Borong, Kecamatan Sinjai Selatan,

Kecamatan Sinjai Tengah, Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Sinjai Utara, dan Kecamatan Tellu Limpoe. Di antara Sembilan Kecamatan tersebut Kabupaten Sinjai terdapat 65 BUMDes. Terkhusus kecamatan Sinjai Selatan terdapat 11 Desa dan memiliki 10 BUMDes, di antaranya desa Alenangka, desa Aska, desa Bulu Kamase, desa Gareccing, desa Palae, desa Palangka, desa Polewali, desa Puncak, desa Sangiasseri, desa Songing, dan desa Talle. Tetapi peneliti hanya memfokuskan untuk melakukan penelitian di Desa Palangka dengan nama BUMDes "TONTI DAENG MAGGANGKA" Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.

BUMDes "Tonti Daeng Maggangka" Desa Palangka Kecamatan Sinjai-Selatan Kabupaten Sinjai berdiri sejak tahun 2012, perjalanan organisasi tersebut telah berlangsung selama enam tahun. Simpan Pinjam merupakan salah satu unit usaha dan telah menjadi sebuah usaha untuk mempermudah masyarakat dalam hal peningkatan perekonomian masyarakat setempat. Selama kurung waktu tersebut telah terjadi perkembangan di BUMDes "Tonti daeng Maggangka"

Dalam hal pembentukan BUMDes di desa palangka ini tak terlepas dari peranan manajemen yang ada dalam kepengurusan BUMDes itu sendiri. Kajian tentang manajemen BUMDes penting dilakukan karena manajemen merupakan satu diantara lima dimensi strategis Ilmu Administrasi Negara (IAN) yang meliputi dimensi kebijakan, dimensi struktur organisasi, dimensi etika, dimensi lingkungan, dan dimensi akuntabilitas, kinerja. Dimensi manajemen menyangkut proses kegiatan-kegiatan yang telah dirancang dapat diimplementasikan dengan cara digerakkan, diorganisir, dan dikontrol, untuk mencapai tujuan organisasi melalui prinsip-prinsip manajemen. Hal ini dapat dianalogikan dengan system jantung dan urat nadi yang menyalurkan darah keseluruh tubuh termasuk organ-organnya agar dapat bergerek dan berfungsi (Keban, 2014).

Dunia manajemen menggunakan prinsip POAC atau Planning, Organizing, Actuating, Controlling. Prinsip manajemen yang digunakan untuk mengajukan dan mengelola organisasi. Planning meliputi pengaturan tujuan dan mencari cara bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Planning telah dipertimbangkan sebagai fungsi utama manajemen dan meliputi segala sesuatu yang manajer kerjakan. Organizing salah satu proses dalam memastikan kebutuhan manusia dan fisik setiap sumber daya tersedia untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan yang berhubungan dengan organisasi. Actuating perencanaan dan pengorganisasian yang baik kurang berarti bila tidak diikuti dengan pelaksanaan kerja. Untuk itu maka dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas dan kerja sama. Semua sumber daya manusia yang ada harus dioptimalkan untuk mencapai visi, misi dan program kerja organisasi. Controlling agar pekerjaan berjalan sesuai dengan visi, misi, aturan dan program kerja maka dibutuhkan pengontrolan. Baik dalam bentuk supervisi, pengawasan, inspeksi hingga audit.

2. Literature Review

2.1. Badan Usaha Milik Desa

BUMDes adalah lembaga usaha berbadan hukum yang didirikan dan dimiliki oleh desa serta bersifat mencari keuntungan. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai: “Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.”

Definisi BUMDes menurut Maryunani (2008), adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi BUMDes adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba.

BUMDes merupakan badan usaha milik desa yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa dan partisipasi masyarakat

BUMDes merupakan institusi yang dibentuk oleh pemerintah desa serta masyarakat mengelola institusi tersebut berdasarkan kebutuhan dan ekonomi desa. BUMDes dibentuk berlandaskan atas peraturan perundang-undang yang berlaku atas kesepakatan antar masyarakat desa. Tujuan BUMDes adalah meningkatkan dan memperkuat perekonomian desa. BUMDes memiliki fungsi sebagai lembaga komersial melalui penawaran sumberdaya lokal yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan lembaga sosial melalui kontribusi penyediaan pelayanan sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat. BUMDes telah memberikan kontribusi positif bagi penguatan ekonomi di pedesaan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat (Alkadafi, 2014).

Ciri utama BUMDes yang membedakan lembaga komersial lain (Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007) adalah (1) Badan usaha merupakan milik desa dan pengelolaannya dilakukan secara bersama-sama; (2) Modal usaha sebesar 51% berasal dari dana desa dan 49% berasal dari dana masyarakat; (3) Operasionalisasi dilakukan berdasarkan pada falsafah bisnis berbasis budaya lokal; (4) Potensi yang dimiliki desa dan hasil informasi pasar yang tersedia menjadi dasar untuk menjalankan bidang usaha; (5) Laba yang diperoleh BUMDes dipergunakan untuk upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat berdasarkan peraturan yang telah disusun; (6) Fasilitas ditunjang oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Pemerintah desa;

dan (7) Pelaksanaan operasionalisasi BUMDes diawasi secara bersama oleh Pemerintah Desa, BPD beserta anggota.

BUMDes sebagai institusi baru di tingkat desa memiliki peluang dan tantangan. Oleh karena itu, tata kelola BUMDes harus disusun sehingga mampu bersaing dan membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian mereka. Institusi yang baik memiliki prinsip atau aturan yang mendukung jalannya organisasi dan terdapat bidang pekerjaan yang tercakup yang digambarkan oleh struktur organisasi pendirian BUMDes perlu menyeimbangkan penguatan aturan tatakelola dan regulasi. Dasar hukum yang lemah dapat menjadikan BUMDes rentan akan konflik.

Pendirian BUMDes diposisikan sebagai salah satu kebijakan untuk mewujudkan Nawa Cita pertama, ketiga, kelima, dan ketujuh, dengan pemaknaan sebagai berikut (Putra, 2015):

- a) BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di desa atau tradisi berdesa;
- b) BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif;
- c) BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di desa;
- d) BUMDes merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi desa dengan menggerakkan unit-unit usaha strategis bagi usaha ekonomi kolektif desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 diamanatkan bahwa pendirian BUMDes bertujuan:

- a) Meningkatkan perekonomian desa;
- b) Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
- c) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
- d) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f) Membuka lapangan kerja;
- g) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi desa; dan
- h) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.

Landasan operasional BUMDes berpedoman pada Anggaran Dasar organisasi yang disusun berdasar musyawarah desa. Tim perumus Anggaran Dasar berjumlah ganjil dan paling banyak terdiri dari tujuh orang, terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan

masyarakat yang melibatkan golongan kurang mampu dan perempuan. Tim perumus mempunyai tugas menggali aspirasi dan merumuskan pokok-pokok aturannya dan hasilnya dituangkan dalam bentuk rancangan Anggaran Dasar (AD) Selain Anggaran Dasar selanjutnya dirumuskan Anggaran Rumah Tangga (ART). Draft dari AD dan ART tersebut dibahas dalam forum musyawarah desa sehingga terwujud AD dan ART final sebagai landasan bagi BUMDesa.

2.2. Manajemen Badan Usaha Milik Desa

BUMDes adalah suatu bentuk partisipasi masyarakat secara keseluruhan yang didirikan berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa. BUMDes didirikan pula atas pertimbangan penyaluran inisiatif masyarakat desa, pengembangan potensi desa, pengelolaan, pemanfaatan potensi desa, pembiayaan dan kekayaan pemerintah desa yang diserahkan untuk dikelola oleh BUMDes.

BUMDes memiliki tujuan yang jelas dan direalisasikan dengan menyediakan layanan kebutuhan bagi usaha produktif diutamakan untuk masyarakat desa yang tergolong kelompok miskin, mengurangi adanya praktek rentenir dan pelepasan uang. Selain itu pula tujuan didirikan BUMDes adalah menciptakan pemerataan lapangan usaha sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat (Ridlwani, 2014).

Prinsip-prinsip dalam mengelola BUMDes (Ridlwani, 2014), adalah (1) Kooperatif, adanya partisipasi keseluruhan komponen dalam pengelolaan BUMDes dan mampu saling bekerja sama dengan baik; (2) Partisipatif, keseluruhan komponen yang ikut terlibat dalam pengelolaan BUMDes diharuskan memberikan dukungan serta kontribusi secara sukarela atau tanpa diminta untuk meningkatkan usaha BUMDes; (3) Emansipatif, keseluruhan komponen yang ikut serta dalam pengelolaan BUMDes diperlakukan seimbang tanpa membedakan golongan, suku, dan agama; (4) Transparan, seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan BUMDes dan memiliki pengaruh pada kepentingan umum harus terbuka dan segala lapisan masyarakat mengetahui seluruh kegiatan tersebut; (5) Akuntabel, keseluruhan kegiatan secara teknis maupun administrative harus dipertanggungjawabkan; dan (6) Sustainabel, masyarakat mengembangkan dan melestarikan kegiatan usaha dalam BUMDes.

2.3. Prinsip-Prinsip Manajemen

Dunia manajemen sebagian besar menggunakan POAC (Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling). Prinsip manajemen POAC ini sangat banyak sekali digunakan oleh organisasi kecil maupun besar yang bertujuan lebih mengembangkan dan mengelola organisasi mereka.

Planning

Planning adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu dan mengembangkan rencana aktivitas dalam sebuah organisasi. Perencanaan merupakan proses yang penting dari segala bentuk fungsi manajemen, karena tanpa adanya perencanaan semua fungsi-fungsi lainnya tidak akan dapat berjalan.

Organizing

Pengorganisasian (*Organizing*) adalah fungsi kedua manajemen. Organizing adalah proses kegiatan dalam menyusun struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber dan lingkungannya. Dengan demikian, hasil dari pengorganisasian itu berupa struktur organisasi.

Setiap tujuan sebuah organisasi pasti ingin dicapai, dan untuk meraih hal tersebut, pengorganisasian sangat berperan penting. Dalam sebuah perusahaan, pengorganisasian biasanya disusun dalam bentuk badan organisasi atau struktur organisasi, setelah itu baru dipecah menjadi beberapa jabatan. Disilah terletak salah satu prinsip manajemen yang membagi setiap tugas dan tanggung jawab dalam sebuah perusahaan yang dibebankan kepada semua anggota organisasi menurut Skill dan kemampuan masing-masing individu.

Actuating

Actuating (pelaksanaan) adalah suatu tindakan yang mengusahakan agar semua perencanaan dan tujuan perusahaan bias terwujud dengan baik dan seperti yang diharapkan. Jadi, pelaksanaan merupakan suatu upaya yang menggerakkan orang-orang untuk mau bekerja dengan sendirinya dan dengan kesadaran yang besar mengabdikan seluruh cita-cita perusahaan dengan cara efektif.

Perencanaan dan pengorganisasian akan berjalan kurang baik jika tidak disertai dengan pelaksanaan. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan sekali bentuk nyata dari kerja keras, kerja sama, dan kerja nyata di dalamnya. pengoptimalan seluruh sumber daya manusia yang ada juga sangat penting, terutama ditujukan untuk mencapai visi, misi dan planning yang telah diterapkan.

Controlling

Pengawasan (*controlling*) adalah proses pengamatan, penentuan standar yang akan diwujudkan, menilai kinerja pelaksanaan, dan jika diperlukan mengambil tindakan korektif, sehingga pelaksanaan dapat berjalan semaksimal mungkin dalam mencapai tujuan perusahaan.

Agar pekerjaan dapat berjalan sesuai yang diharapkan maka akan di butuhkan pengontrolan yang optimal, baik itu dalam bentuk supervise, pengawasan, inspeksi dan audit.

Tujuan utama dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan adalah menciptakan kegiatan-kegiatan manajemen yang dinamis dan terwujud secara efektif dan efisien. Sesuai dengan perannya dalam sebuah organisasi, controlling memiliki beberapa fungsi utama :

- a) Mencegah terjadinya penyimpangan.
- b) Memperbaiki kelemahan dan kesalahan, serta menindak penyalahgunaan dan penyelewengan.
- c) Mendinamisasikan organisasi serta kegiatan dalam manajemen.
- d) Memperkuat rasa akan tanggung jawab tiap individu.
- e) Mengambil tindakan korektif jika pelaksanaan menyimpang dari perencanaan atau standar yang telah ditetapkan.

Dalam buku panduan BUMDes yang dikeluarkan departemen pendidikan nasional (2007) prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar difahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip memiliki prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu :

- a) Kooperatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- b) Partisipatif. Semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
- c) Emantisipatif. Semuakomponen yang terlibat dalam BUMDes harus diperlakukan samatanpa memandang golongan, suku, agama.
- d) Transparan. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- e) Akuntabel. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
- f) Sustainable. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

3. Metode, Data, dan Analisis

Penelitian ini dilaksanakan pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit Balangnipa Sinjai Utara di Kabupaten Sinjai. Waktu penelitian kurang lebih selama dua bulan yaitu bulan Oktober dan November 2019. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi dan wawancara.

Populasi yang terkait dalam penelitian adalah data laporan keuangan khususnya laporan tingkat suku bunga kredit serta cacatan atas laporan kredit modal kerja. Sampel dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan khususnya laporan tingkat suku bunga kredit serta cacatan atas laporan kredit modal kerja untuk 3 tahun yaitu 2016-2018 pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit Balangnipa. Instrumen penelitian yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data adalah laporan keuangan mengenai tingkat suku bunga. Sedangkan, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Manajemen Pengelolaan BUMDes (Y)

Berdasarkan pengujian maka diketahui bahwa jumlah variable Y dari 62 responden yaitu Y.1 terdapat 7 responden yang menyatakan sangat tidak setuju, 4 responden yang menyatakan tidak setuju, 18 responden yang menyatakan cukup setuju, 23 responden yang menyatakan setuju, dan 10 responden yang menyatakan sangat setuju. Untuk indikator Y.2 terdapat 2 responden yang menyatakan sangat tidak setuju, 8 responden yang menyatakan tidak setuju, 22 responden yang menyatakan cukup setuju, 25 responden yang menyatakan setuju, dan 5 responden yang menyatakan sangat setuju.

Untuk indikator Y3 terdapat 3 responden yang menyatakan sangat tidak setuju, 8 responden yang menyatakan tidak setuju, 26 orang yang menyatakan cukup setuju, 19 orang menyatakan setuju, dan 6 responden menyatakan sangat setuju. Untuk indikator Y4, terdapat 1 responden yang menyatakan sangat tidak setuju, 9 responden menyatakan tidak setuju, 19 responden yang menyatakan setuju, dan 6 responden menyatakan sangat setuju. Untuk indikator Y5, terdapat 3 responden yang menyatakan sangat tidak setuju, 4 responden yang menyatakan tidak setuju, 24 responden yang menyatakan cukup setuju, 23 responden yang menyatakan setuju, dan 8 responden yang menyatakan sangat tidak setuju.

Untuk indikator Y6, terdapat 3 responden yang menyatakan sangat tidak setuju, 8 responden yang menyatakan tidak setuju, 20 responden yang menyatakan cukup setuju, 21 responden yang menyatakan setuju, dan 10 responden yang menyatakan sangat setuju..

4.2. Perencanaan (Planning)

Berdasarkan pengujian maka diketahui bahwa jumlah variable X dari 62 responden yaitu X.1.1 terdapat 7 responden yang menyatakan sangat tidak setuju, 4 responden yang menyatakan tidak setuju, 18 responden yang menyatakan cukup setuju, 23 responden yang menyatakan setuju, dan 10 responden yang menyatakan sangat setuju.

Untuk indikator X1.2 terdapat 2 responden yang menyatakan sangat tidak setuju, 8 responden yang menyatakan tidak setuju, 22 responden yang menyatakan cukup setuju, 25 responden yang menyatakan setuju, dan 5 responden yang menyatakan sangat setuju. Untuk indicator X1.3 terdapat 3 responden yang menyatakan sangat tidak setuju, 8 responden yang menyatakan tidak setuju, 26 orang yang menyatakan cukup setuju, 19 orang menyatakan setuju, dan 6 responden menyatakan sangat setuju.

Untuk indikator X1.4, terdapat 1 responden yang menyatakan sangat tidak setuju, 9 responden menyatakan tidak setuju, 19 responden yang menyatakan setuju, dan 6 responden menyatakan sangat setuju. Untuk indikator.

4.3. Pelaksanaan (Implementation)

Berdasarkan pengujian maka diketahui bahwa untuk variabel X jumlah 62 responden untuk X2.1 terdapat 4 responden yang menyatakan sangat tidak setuju, 10 responden yang menyatakan tidak setuju, 15 responden yang menyatakan cukup setuju, 20 responden yang menyatakan setuju, dan sedangkan yang menyatakan sangat setuju sebanyak 13 responden. Untuk indikator X2.2 terdapat 2 responden yang menyatakan sangat tidak setuju, 8 responden yang menyatakan tidak setuju, 24 responden menyataka cukup setuju, 21 responden menyatakan setuju, dan yang menyatakan sangat setuju 7 responden.

Untuk indikator X2.3 terdapat 3 responden yang menyatakan sangat tidak setuju, 12 responden menyatakan tidak setuju, 23 responden menyatakan cukup setuju, 16 responden menyatakan setuju, dan 8 responden yang menyatakan sangat setuju. Untuk indikator X2.4 terdapat 1 responden yang menyatakan sangat tidak setuju, 7 responden yang menyatakan tidak setuju, 23 responden yang menyatakan cukup setuju, 25 responden menyatakan setuju, dan 6 responden menyatakan sangat setuju. Untuk indikator X2.5, 3 responden yang menyatakan sangat tidak setuju, 9 responden yang menyatakan tidak setuju, 26 responden yang menyatakan cukup setuju, 16 responden menyatakan setuju, sedangkan yang menyatakan sangat setuju sebanyak 8 responden.

4.4. Pengawasan (Controlling)

Berdasarkan pengujian maka diketahui bahwa untuk variabel X jumlah 62 responden untuk X3.1 terdapat 4 responden yang menyatakan sangat tidak setuju, 10 responden yang menyatakan tidak setuju, 15 responden yang menyatakan cukup setuju, 20 responden yang menyatakan setuju, dan sedangkan yang menyatakan sangat setuju sebanyak 13 responden. Untuk indikator X3.2 terdapat 2 responden yang menyatakan sangat tidak setuju, 8 responden yang menyatakan tidak setuju, 24

responden menyatakan cukup setuju, 21 responden menyatakan setuju, dan yang menyatakan sangat setuju 7 responden.

Untuk indikator X3.3 terdapat 3 responden yang menyatakan sangat tidak setuju, 12 responden menyatakan tidak setuju, 23 responden menyatakan cukup setuju, 16 responden menyatakan setuju, dan 8 responden yang menyatakan sangat setuju. Untuk indikator X3.4 terdapat 1 responden yang menyatakan sangat tidak setuju, 7 responden yang menyatakan tidak setuju, 23 responden yang menyatakan cukup setuju, 25 responden menyatakan setuju, dan 6 responden menyatakan sangat setuju. Untuk indikator X3.5, 3 responden yang menyatakan sangat tidak setuju, 9 responden yang menyatakan tidak setuju, 26 responden yang menyatakan cukup setuju, 16 responden menyatakan setuju, sedangkan yang menyatakan sangat setuju sebanyak 8 responden.

5. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka disimpulkan bahwa *Planning, Organizing, Implementation, dan Controlling* mempunyai pengaruh yang simultan terhadap manajemen BUMDes. Dari keempat manajemen tersebut, yang paling dominan pengaruhnya adalah *Planning*.

Referensi

- Alkadafi, 2014. Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community 2015. *Jurnal ElRiyasah*, 5(1), 32-40.
- Hayyuna Pratiwi, & Mindarti 2012. Strategi Manajemen Aset BUMDes dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa. Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang.
- H. Malayu SP Hasibuan (2009:1). *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Juliandi, Azuar dan Irfan, 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Bisnis*, Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Keban, 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Gava Media. Yogyakarta
- Manullang (2012 : 3). *Dasar – Dasar Manajemen*. UGM : Yogyakarta
- Maryunani (2008:35). *Pembangunan Bumdes dan Pemerdayaan Pemerintah Desa*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Nurcholis, (2011:88). *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta : penerbit ERLANGGA.

- Putra, 2015. .Pengaruh Kepemimpinan, Komunikasi, Lingkungan Kerja terhadap Semangat Kerja Pegawai pada PT.ANGKASA PURA Divis Komersial.E- Journal Manajemen Universitas Udayana Vol 3 No 2 1.h i-12
- Ridlwan, 2014. Pembelajaran saintifik untuk kurikulum 2013. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siswanto, 2012. Pengantar Manajemen. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sugiono 2014. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. (Bandung: ALFABETA).
- Sunyoto 2011. Manajemen dan pengembangan sumber daya manusia (Cetakan Pertama). Yogyakarta : CAPS (Center for Academic Publising Service).
- Teddy Kusuma 2018. Pembentukan dan pengelolaan BUMDes Karya Mandiri Sejati. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung : Bandar Lampung.
- Wati dan Madiarsa 2016. Pengembangan usaha BUMDes Desa Tanjung dan Depeha. Fakultas Ekonomi Universitas Panji Sakti Singaraja : Bali.
- Wibowo, 2016. Manajemen Kinerja. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-undang nomor 6 tahun 2014. Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.